KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR sesalkan bungkamnya Asean
Tanggal : Kamis, 16 November 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 9

DPR Sesalkan Bungkamnya ASEAN

● AMRI AMRULLAH, CRYSTAL LIESTIA PURNAMA

JAKARTA – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Rofi Munawar menyesalkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Association of South-East Asia (ASEAN) di Filipina tidak membahas tragedi kemanusiaan Rohingya secara serius. Ia menilai ASEAN hanya menyinggung masalah Rohingya secara sangat normatif dan tidak menunjukkan langkah konkret.

"ASEAN mengadakan kegiatan KTT sangat formalistik, berjarak, dan 'bebas nilai'. Situasi ini tecermin dari perhatian mereka yang minim terhadap urusan etnis Rohingya meski saat ini terus terusir dari Rakhine," kata Rofi Munawar dalam keterangan pers, Rabu (15/11).

Sebagaimana diwartakan *Reuters*, naskah awal komunike bersama hasil KTT ke-31 ASEAN dilaporkan tidak sekali pun mencantumkan kata "Rohingya" sebagai sebutan untuk etnis Muslim korban kekerasan militer di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. "Charter ASEAN memang menuangkan prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN. Namun, hal tersebut tidak berarti abai atas pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar," kata Rofi.

Politikus PKS itu menjelaskan, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) belum lama ini telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait Rohingya. PBB meminta militer Myanmar menghentikan proses genosida terhadap etnis Rohingya.

Maka, sudah sepantasnya, menurut dia, ASEAN menjadikan sikap tersebut sebagai panduan dalam mengambil kebijakan. Namun, yang terjadi selama ini justru sangat memprihatinkan dan jauh dari langkah-langkah konkret. "ASEAN tampak dingin dalam menanggapi persoalan Rohingya, padahal di sana ada permasalahan hak asasi manusia dan solidaritas yang rendah di Negara Myanmar" ujar Rofi.

Ia melihat usaha diplomatik Indonesia untuk mendorong negara ASEAN lainnya ternyata belum membuahkan hasil. Skema 4+1 yang didorong oleh Pemerintah Indonesia terhadap kekerasan etnis di Rakhine dianggap angin lalu oleh Myanmar.

Empat formula tersebut yakni menjunjung perdamaian dan stabilitas di wilayah Rakhine. Proteksi untuk semua warga negara tanpa memandang latar belakang suku dan agama, menahan diri secara maksimal, dan tak menggunakan kekerasan. Serta akses kepada sistem perlindungan kemanusiaan.

Adapun "plus satu" adalah implementasi dari rekomendasi Laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine State di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dipimpin oleh Kofi Annan. "Padahal, Pemerintah Indonesia sangat serius mendorong isu ini sebagai salah satu prioritas bahasan, karena forum tersebut sarana yang sangat tepat untuk menegaskan sikap Indonesia dan langkah serius Pemerintahan Myanmar," kata dia..

Richard Heydarian, analis geopolitik dari De La Salle University di Manila, menilai bungkamnya ASEAN berkaitan dengan beban masing-masing negara. Menurut dia, Presiden Filipina Rodrigo Duterte enggan menyinggung Myanmar karena khawatir pelanggaran HAM di Filipina terkait pemberantasan narkoba bakal disorot. "Saya pikir ini adalah hal terburuk yang bisa terjadi di ASEAN karena di samping Suriah, krisis Rohingya adalah krisis kemanusiaan terbesar yang sedang kita hadapi saat ini," ujar Heydarian seperti dikutip *Aljazirah*, kemarin. ■ **ed:** fitriyan zamzami